

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Selama bertahun-tahun akuntansi sektor publik Indonesia semakin berkembang, tetapi tidak secepat akuntansi sektor swasta. Hal ini disebabkan karena adanya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang menitik beratkan pada pemerintah daerah melalui UU No.32 dan 33 Tahun 2004. Dengan adanya peraturan ini diharapkan keuangan daerah dapat meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan, dengan harapan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dengan perkembangan ini, masyarakat semakin menuntut pemerintah untuk memberikan informasi tentang program atau tindakan apa yang dilakukan pemerintah (Juwita, 2020).

Keberhasilan otonomi daerah salah satu indikatornya adalah adanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, kehidupan demokrasi yang semakin maju. Di dalam sektor publik, semua karyawan atau pegawai bekerja untuk satu tujuan yaitu pemenuhan pelayanan publik. Namun pada sektor swasta, segala aktivitas dan sumber daya manusianya terfokus pada keuntungan dan persaingan antar organisasi dan produk yang dihasilkan. Persaingan inilah yang menghantarkan kinerja sektor swasta cenderung lebih cepat berkembang dari pada sektor publik (Halim & kusufi, 2018). Pemberian otoritas manajemen dari jenjang yang lebih tinggi ke jenjang bawahnya menghasilkan tanggung jawab. Manajemen menggunakan akuntansi pertanggungjawaban untuk mengukur dan menilai kinerja manajemen setiap pusat pertanggungjawaban. Ini digunakan untuk mempertanggung jawabkan kinerja manajemen dengan menjalankan anggaran dan memenuhi rencana anggaran pada waktunya (Trisnanda et al., 2022).

Karena akuntansi pertanggungjawaban memungkinkan pencatatan aktivitas dan program serta menentukan seberapa efisien dan efektif unit tersebut melaksanakan tugasnya, akuntansi ini umumnya digunakan oleh perusahaan dan organisasi publik. Manager pusat pertanggungjawaban harus membuat laporan pertanggungjawaban yang mencakup anggaran dan hasil (Ikhyanuddin, 2021). Anggaran yang telah ditetapkan dapat dilihat dari pembuatan laporan tersebut. Laporan pertanggungjawaban juga dapat digunakan sebagai referensi untuk menilai pencapaian kerja di unit organisasi (Imelia et al., 2021).

Akuntansi pertanggungjawaban salah satu metode yang paling populer karena memungkinkan organisasi untuk merekam semua operasinya, mengetahui bagian atau unit mana yang bertanggung jawab atas operasi tersebut, dan menentukan bagian atau unit mana yang tidak bekerja dengan baik (Wandari & Sujana, 2021). Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, laporan keuangan harus dibuat oleh pemerintah provinsi, pusat, kabupaten, dan kota. Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menetapkan bahwa Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota harus menyampaikan dan mempresentasikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD dalam bentuk laporan keuangan yang terkait (Hati, 2019).

Menurut PP 71 Tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah standar akuntansi yang harus digunakan untuk membuat dan menyajikan laporan keuangan Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, Standar Akuntansi Pemerintah menjadi persyaratan hukum yang kuat untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintahan Daerah di Indonesia. Setiap Pemerintahan Daerah harus menggunakan sistem akuntansi untuk dapat membuat laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (Anastasia & Anizar, 2022).

Laporan keuangan pemerintah daerah Tahun Anggaran 2015 telah diserahkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat (Wiyono, 2016). Hasilnya menunjukkan bahwa beberapa kota mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Kabupaten Cirebon adalah salah satunya. Pemerintah Kabupaten Cirebon kekurangan 3.000 karyawan sipil. Tahun 2019, Lia Yuliana dari Bagian Sub Bidang Akuntansi Kabupaten Cirebon menyatakan bahwa proses penyusunan laporan belum stabil. Banyak SKPD masih belum dapat melakukan rekonsiliasi dan masih menerima bantuan dari Bagian Sub Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dalam perhitungan. Kekurangannya paham sistem akuntansi pertanggungjawaban serta jumlah karyawan akuntansi di BKAD kurang dari 5 orang menyebabkan kendala dalam penyusunan pelaporan keuangan (Suryani et al., 2021).

Akuntansi pertanggungjawaban memungkinkan para pimpinan untuk lebih efisien memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada mereka di tingkat yang lebih rendah tanpa melakukan pengawasan langsung atas seluruh operasi perusahaan. Selain itu, akuntansi pertanggungjawaban harus dievaluasi dengan baik agar manajemen dapat dengan mudah menghubungkan biaya dengan manajer pusat pertanggungjawaban yang

bertanggung jawab. Akuntansi pertanggungjawaban yang baik dapat membantu bisnis mencapai tujuan mereka (Wandari & Sujana, 2021).

Dalam perspektif Islam, hukum akuntansi pertanggungjawaban didasarkan pada fakta bahwa akuntansi pertanggungjawaban melaporkan setiap transaksi yang terjadi dengan benar, jujur, dan teliti, sesuai dengan hukum Islam. Laporan hitungan akhir dan neraca keuangan harus dibuat dengan amanah oleh orang yang menyiapkannya. Ia harus menyembunyikan rahasia yang harus ia jaga secara syar'i dan memaparkan apa yang layak. Semua aktivitas manusia didorong oleh sifat amanah ini, yang dijelaskan dalam Q.S al Qashar: 26 (Harfendi, 2022). Dalam perspektif Islam yang berbeda, bersifat adil. Ini menunjukkan bahwa manusia pada dasarnya memiliki kekuatan dan kemampuan untuk bertindak adil dalam setiap aspek kehidupan mereka. Dalam ayat 282 Al-Baqarah, kata "adil" menegaskan bahwa transaksi yang dilakukan oleh perusahaan harus dicatat dengan benar dan jumlah yang sama harus sesuai dengan nominal transaksi (Syahida, 2022).

Oleh karena itu, akuntansi pertanggungjawaban salah satu bagian dari sistem akuntansi manajemen. Di sini, data yang dihasilkan adalah data yang berkaitan dengan pusat pertanggungjawaban perusahaan. Tidak sulit untuk menerapkan akuntansi pertanggungjawaban karena ada bantuan seperti teknologi informasi yang memudahkan pegawai mengolah data dan menyelesaikan masalah dengan cepat. Selain itu, kemungkinan salah saji selama proses pengolahan data dapat dikurangi dengan teknologi informasi. Menurut Wijaya (2018), teknologi informasi merupakan alat yang dapat membantu seseorang menyelesaikan tugas (Sharon & Mintalangi, 2021).

Teknologi informasi awalnya alat penyampaian pesan yang sangat sederhana dengan jangkauan terbatas, tetapi telah berkembang menjadi teknologi komunikasi digital yang dapat mengirimkan data dan informasi secara global. Komputer, yang dapat memproses dan mengolah data secara sistematis, memungkinkan kemajuan besar dalam teknologi informasi. Teknologi informasi juga mencakup penggunaan alat bantu untuk memproses, mengolah, dan mengubah data (Eskak, 2020). Teknologi informasi muncul sebagai akibat dari luasnya persaingan bisnis yang semakin kompetitif dan globalisasi dalam kehidupan organisasi. Untuk mengantisipasi semua ini, perusahaan menggunakan teknologi untuk menemukan hal-hal baru. Teknologi diharapkan dapat membantu dan menjelaskan. Teknologi informasi sebelumnya hanya digunakan untuk pemrosesan data. Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi, hampir semua aktivitas organisasi sekarang bergantung pada aplikasi dan otomatisasi TI (Maghfiroh, 2022).

Untuk pengelolaan keuangan daerah pada BKAD Kabupaten Cirebon menggunakan aplikasi SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) yaitu sebuah aplikasi terpadu dari pemerintah yang digunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan dengan asas efisiensi, efektif, ekonomis, transparan dan akuntabel. Namun dengan adanya aturan baru dari Kemendagri yang mengharuskan seluruh OPD menggunakan SIPD.

SIPD merupakan sistem untuk mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah dengan tujuannya untuk mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah (Haryati, 2022).

Dari hasil wawancara salah satu pegawai BKAD mengatakan jika penerapan SPID di BKAD Kabupaten Cirebon masih belum bisa diimplementasikan dikarenakan kurang siapnya BKAD sendiri dalam segi SDM pegawai dan keterbatasan data. Serta dalam SIPD banyak pegawai yang masih kurang paham dalam menggunakan aplikasi, dikarenakan banyak menu yang harus diisi dalam menginput data di SIPD, sehingga seringkali para pegawai melewatkan salah satu proses penginputan sehingga laporan yang dihasilkan berbeda dan sistem penggajian berbeda (Nasution & Si, 2021).

BKAD Kabupaten Cirebon kemudian membuat aplikasi baru. Ini dimaksudkan untuk memenuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Akhirnya, BKAD membuat aplikasi yang dikenal sebagai SIKATON (Sistem Informasi Keuangan Akuntansi Kabupaten Cirebon) setelah memiliki inovasi yang dapat memenuhi peraturan pemerintah (Amalia Yunia Rahmawati, 2020).

SIKATON merupakan aplikasi untuk penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah Kabupaten Cirebon. Ini dibuat oleh BKAD Kabupaten Cirebon untuk membuat pengelolaan barang milik daerah lebih akurat, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun manfaat dari aplikasi SIKATON ini adalah memungkinkan SKPD untuk melakukan penatausahaan keuangan daerah, yang mempercepat proses penyerapan anggaran belanja dengan cepat dan lancar sesuai dengan

aturan yang berlaku, dan memberikan informasi yang akurat tentang penyajian keuangan setiap bulan (Ramadhani et al., 2020).

Berdasarkan informasi yang diperoleh dalam berita yang dipublikasi oleh kabar Cirebon pada website (*Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon Nilai Sistem TI BKAD Belum Optimal*, n.d.) menyatakan jika Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon menilai, penggunaan sistem teknologi informasi (TI) di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) belum berjalan optimal sejauh ini hanya ada beberapa SKPD yang sudah terintegrasi. Ada beberapa masalah dengan penerapan sistem informasi akuntansi keuangan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon, yang lebih banyak disebabkan oleh kesalahan manusia, seperti kesalahan input data. Selain itu, ada masalah keamanan sistem informasi akuntansi keuangan di BKAD, yang termasuk serangan hacker yang menghapus data dan menyebabkan website tidak dapat diakses, yang menghambat pekerjaan BKAD.

Selain teknologi informasi dan akuntansi pertanggungjawaban, perusahaan dapat mengukur efektivitas pengendalian biaya dengan membandingkan biaya taksiran dengan biaya standar. Ini menghasilkan nilai dalam perusahaan dan menentukan apakah pengendalian biaya tersebut efektif atau tidak. Untuk memastikan bahwa kinerja sesuai dengan tujuan dan visi yang telah ditetapkan, partisipasi dalam proses penyusunan anggaran sangat penting. Menurut Crystallography 2016 dalam penyusunan anggaran, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan bersama oleh dua atau lebih pihak sangat penting karena keputusan ini akan berdampak pada organisasi di masa depan. Menurut Brownel (1982), partisipasi anggaran didefinisikan sebagai tingkat keterlibatan dan pengaruh seseorang (manajer) dalam penyusunan anggaran. Oleh karena itu, partisipasi anggaran yang baik melibatkan atasan dan bawahan organisasi, bukan semua (Daulay, 2022).

Untuk meningkatkan kinerja pengelola keuangan, banyak faktor yang perlu diperhatikan, salah satunya adalah partisipasi dalam penyusunan anggaran. Teori yang ditemukan oleh Handoko (1998) mendefinisikan partisipasi sebagai cara untuk mencapai tujuan dan juga sebagai cara untuk mengintegrasikan kebutuhan individu dan organisasi. Diharapkan partisipasi yang baik dalam proses penyusunan anggaran dapat meningkatkan kinerja. Ketika suatu tujuan dirancang dan disetujui secara partisipatif, karyawan akan menginternalisasikan tujuan tersebut dan memiliki rasa tanggung jawab pribadi untuk mencapainya. Kinerja pemerintah daerah meningkat karena partisipasi dalam penyusunan anggaran. (Lagasih & Tanamal, 2022). Anggaran dapat didasarkan

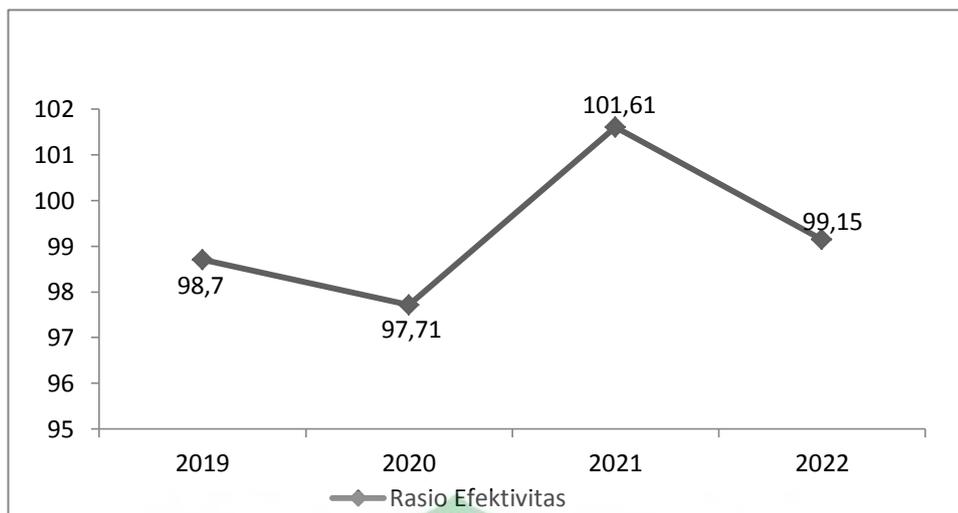
pada prinsip-prinsip Islam seperti Tauhid, Keadilan, dan Pertanggung jawaban. Akibatnya, partisipasi anggaran dalam bisnis syariah sangat penting. Ini membantu transparansi anggaran dan kontrol kinerja manajemen (Hikmah & Yusrizal, 2023).

Ada dua cara berbeda untuk menyusun anggaran yaitu top-down dan bottom-up. Dalam metode top-down, anggaran disusun dan disetujui oleh manajemen level atas, dan manajemen level bawah hanya melaksanakan anggaran yang disetujui. Dalam metode bottom-up, manajemen level bawah diberi wewenang untuk kemudian menyusun anggaran (Sela, 2020). Saat melakukan wawancara dengan karyawan BKAD, saya menemukan bahwa metode top-down yang digunakan di kantor BKAD. Selain itu, sistem atau mekanisme yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran dan keuangan masih belum terintegrasi dengan baik untuk memastikan pengelolaan keuangan yang jelas, akuntabel, efisien, dan efektif. Jadi peneliti ingin mengetahui apakah menggunakan metode top-down dapat mempengaruhi efektivitas pengendalian biaya secara signifikan atau sebaliknya tidak. Ini juga ditunjukkan dalam studi sebelumnya. Hubungan antara partisipasi dalam penyusunan anggaran dan kinerja pegawai aparatur pemerintah adalah masalah yang banyak diperdebatkan, dan hasil penelitian empiris tidak konsisten. Hasil di beberapa organisasi pemerintah menunjukkan bahwa partisipasi dalam penyusunan anggaran tidak signifikan (Burta, 2018).

Dengan demikian, teknologi informasi dan partisipasi dalam penyusunan anggaran dapat meningkatkan pengendalian biaya dengan menerapkan akuntansi pertanggungjawaban. Perencanaan yang matang dan pengendalian yang efektif terhadap biaya yang akan dikeluarkan dalam kegiatan operasional sangat penting untuk masa depan bisnis agar dapat bertahan dan berkembang. Pengendalian yang efektif terhadap biaya dalam kegiatan operasional membantu perusahaan menganalisis variasi biaya operasional yang terjadi (Rustan et al., 2019).

Namun pada dasarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan sering kali terjadi kelebihan dan kekurangan biaya dalam aktivitasnya. Dengan terjadi kelebihan dan kekurangan biaya maka akan mengakibatkan efisiensi tidak akan tercapai sehingga menghambat masalah pencapaian suatu tujuan dalam perusahaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa biaya merupakan faktor utama dalam menjalankan perusahaan (Malasari, 2023). Di Indonesia, penyimpangan anggaran sering terjadi di tingkat pemerintah pusat dan daerah, bahkan di tingkat lebih kecil seperti dinas. Semua lembaga pemerintahan, dalam berbagai sektor, mengalami pemborosan anggaran. Perjalanan dinas yang direncanakan,

laporan, atau kuitansi yang sudah dimarkup dapat menjadi contoh penyimpangan ini, serta pemungutan biaya untuk pelayanan yang seharusnya gratis.



Gambar 1.1

Hasil Perhitungan Dengan Menggunakan Rasio Efektivitas Pada Tahun 2019-2022

Sumber: BKAD Kabupaten Cirebon 2023

Pada gambar diatas menunjukan bahwa kinerja pengelolaan anggaran pada tahun 2019 - 2022 dinilai berdasarkan rasio efektivitas mengalami penurunan kemudian kenaikan dan penurunan lagi. Dimana jika semakin besar persentase efektivitas maka kinerja keuangan pemerintah daerah dikatakan semakin baik. Pada tahun 2019 rasio efektivitas berada pada tingkat 98,70% hal ini dikatakan efektif karena realisasi anggarannya sudah mendekati target yang ditetapkan. Pada tahun 2020 rasio efektivitas mengalami penurunan berada pada tingkat 97,71% namun ini dikatakan masih efektif karena sudah masih mendekati taget yang dianggarkan. Pada tahun 2021 rasio efektivitas meningkat berada pada tingkat 101,61% hal ini dikatakan efektif karena realisasi anggarannya telah mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2022 rasio efektivitas mengalami penurunan berada pada tingkat 99,15% hal ini masih dikatakan efektif karena realisasi anggarannya telah mendekati target yang telah ditetapkan.

Perkembangan Kabupaten Cirebon dapat dilihat dari bentuk pemerintahannya: sebagian besar wilayahnya terletak di sepanjang pantai laut Jawa, dan sebagian lagi berada di daerah perbukitan. Sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pemerintah Kabupaten Cirebon, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Cirebon berfungsi untuk mendukung visi dan misi Kabupaten Cirebon dan melaksanakan tugas yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah tentang struktur organisasi pemerintah.

Tugas utama BKAD Kabupaten Cirebon adalah membantu bupati melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dibidang pengelolaan keuangannya (Amalia Yunia Rahmawati, 2020).

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Cirebon adalah salah satu kantor pemerintahan di Kabupaten Cirebon yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan pembantuan di bidang Keuangan dan Aset Daerah serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai ruang lingkup tugas dan fungsinya (R Yuliandry Indra Nugraha, 2020). Karena statusnya sebagai daerah otonom, Kabupaten Cirebon harus mengikuti sistem pengelolaan daerah yang ada. Namun, di balik itu, tentunya harus tetap berdasarkan peraturan dan undang-undang pemerintah yang ada saat ini. Pengelola keuangan daerah adalah Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD), yang bertanggung jawab untuk mendelegasikan ke bawahannya sesuai dengan instansi yang berkompeten tentang keuangan daerah (Nuraini, 2022).

Sehingga tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi pertanggungjawaban, teknologi informasi dan partisipasi penyusunan anggaran serta untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi pertanggungjawaban ,teknologi informasi dan partisipasi penyusunan anggaran dapat mengefektifkan pengendalian biaya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat tema penelitian dengan judul **“Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban, Teknologi Informasi, Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Efektivitas Pengendalian Biaya”**

B. Identifikasi Masalah

1. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon pada laporan realisasi anggaran di tahun 2020 dan 2022 mengalami penurunan.
2. Terdapat kebocoran dana akibat penyimpangan anggaran berupa perjalanan dinas pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.
3. Belum optimalnya pengoperasian Aplikasi SIKATON (Sistem Informasi Keuangan Akuntansi Kabupaten Cirebon) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini dibuat untuk membahas lebih lanjut mengenai Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban, Teknologi Informasi, Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Efektivitas Pengendalian Biaya. Pokok permasalahan tersebut telah dicantumkan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh penerapan akuntansi pertanggungjawaban terhadap efektivitas pengendalian biaya?
2. Bagaimana pengaruh penerapan teknologi informasi terhadap efektivitas pengendalian biaya?
3. Bagaimana pengaruh penerapan partisipasi penyusunan anggaran terhadap efektivitas pengendalian biaya?
4. Bagaimana pengaruh secara simultan penerapan akuntansi pertanggungjawaban, teknologi informasi dan partisipasi penyusunan anggaran terhadap efektivitas pengendalian biaya?

D. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan permasalahan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh secara parsial penerapan akuntansi pertanggungjawaban terhadap efektivitas pengendalian biaya .
2. Untuk menganalisis pengaruh secara parsial penerapan teknologi informasi terhadap efektivitas pengendalian biaya.
3. Untuk menganalisis pengaruh secara parsial penerapan partisipasi penyusunan anggaran terhadap efektivitas pengendalian biaya.
4. Untuk menganalisis pengaruh secara simultan penerapan akuntansi pertanggungjawaban, teknologi informasi dan partisipasi penyusunan anggaran terhadap efektivitas pengendalian biaya.

E. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian pasti memiliki manfaat didalamnya, dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya mengenai akuntansi pertanggungjawaban, informasi teknologi dan partisipasi penyusunan anggaran. Sehingga dapat dijadikan sebagai suatu sumber informasi dan referensi terhadap penelitian yang akan datang.

2. Secara Praktis

- a. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan bahan evaluasi untuk para pegawai di Kantor Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Cirebon.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai media edukasi dan pengenalan tentang akuntansi pertanggungjawaban pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Cirebon.
- c. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan serta referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan akuntansi pertanggungjawaban.

F. Sistematika Penulisan

Secara umum, pembahasan skripsi ini terbagi menjadi lima bab dengan sistematika penulisan berikut :

BAB I, berisi pendahuluan yang membahas tentang abstrak dari skripsi penelitian. Bab nya terdiri atas latar belakang yang menguraikan tentang awal persoalan yang melatarbelakangi penulis untuk mengangkat tema ini, rumusan masalah yang berisi pertanyaan - pertanyaan mengenai persoalan yang akan dibahas di dalam penelitian ini, tujuan penelitian yang isinya mengapa penelitian ini perlu dilakukan, manfaat penelitian merupakan keuntungan yang akan didapat oleh pihak - pihak tertentu dari penelitian ini.

BAB II, berisi tentang landasan teori yang merupakan referensi awal untuk mengkaji lebih lanjut mengenai kajian yang sama.

BAB III, berisi tentang metode penelitian yang merupakan pedoman yang penulis lakukan dalam penelitian.

BAB IV, berisi hasil dan pembahasan yang mengenai gambaran umum BKAD Kabupaten Cirebon serta hasil dari penelitian dan pembahasan penelitian

BAB V, berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Terdapat saran yang akan menjadi acuan bagi perbaikan untuk penelitian selanjutnya.